

RUMUSAN RAPAT KERJA PROGRAM PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020

Rapat Kerja Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dengan Tema “**Peningkatan Daya Saing Produk Dan Sumberdaya Manusia Untuk Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Yang Berkelanjutan**” dilaksanakan di Novotel Hotel & Resort Surabaya pada tanggal 17 s/d 19 Juni 2019, dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh peserta dari :

- Dinas yang membidangi Perikanan kabupaten/kota se Jawa Timur;
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup KKP-RI di Jawa Timur;
- Cabang Dinas Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;
- *Stakeholder* kelautan dan perikanan
- Pejabat dan staf lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan **Arahan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur** serta memperhatikan paparan dari beberapa narasumber sebagai berikut :

1. Bidang Ekonomi - Bappeda Provinsi Jawa Timur
2. Biro Perencanaan - Sekretaris Jenderal KKP RI
3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP RI
4. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI
5. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP RI
6. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP RI
7. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP-RI
8. Akademisi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
9. Sekretaris dan Kepala Bidang Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

Dirumuskan beberapa hal sebagai berikut :

A. RENCANA PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI JAWA TIMUR TAHUN 2019 -2024

Saat ini perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur berada pada tahap Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur mendukung pada Misi 1 Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yakni "Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah" khususnya pada Tujuan 1 "Mengembangkan kerjasama ekonomi dan keterkaitan antar kelompok, antar sektor dan antar wilayah" pada sasaran "Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan".

Sebagaimana ditetapkan dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, target Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	IK TUJUAN/ SASARAN	KONDISI KINERJA PD AWAL PERIODE RENSTRA	TAHUN						KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA
				TAHUN 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan		Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan (%)	- 0,88	4,90	4,95	5,00	5,05	5,10	5,15	5,15
		Meningkatnya nilai tambah sub kategori perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Sub Kategori Perikanan (%)	4,85	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	7,50
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi implementasi SAKIP	86.41	86.91	87.41	87.91	88.41	88.91	89.41	89.41

Beberapa isu/permasalahan utama pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Belum optimalnya upaya pemulihan Sumber Daya Ikan;

3. Belum optimalnya usaha budidaya laut;
4. Belum optimalnya diversifikasi usaha dan produk dari hulu ke hilir;
5. Belum optimalnya produksi dan produktivitas garam;
6. Bahan baku ikan untuk industri olahan masih terbatas;
7. Pembatasan kuota impor, dengan masa pemberlakuan yang tidak signifikan dengan waktu proses penerbitan ijin;
8. Maraknya sweeping dari aparat penegak hukum atas pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Masih maraknya kegiatan ilegal dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2019-2024 ditujukan dalam rangka memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Dalam rangka mendukung misi tersebut maka program prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

- Pemenuhan bahan baku dilakukan melalui :
 - Pemulihan Stok Sumber Daya Ikan (SDI) melalui restocking di laut dan perairan umum darat serta penenggelaman rumah ikan;
 - Penguatan budidaya laut.
- Penguatan Produktivitas Garam
- Penguatan Logistik dan Distribusi
- Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
- Penyempurnaan Pelabuhan Perikanan
- ASURANSI HAK ATAS TANAH (Nelayan dan Pembudidaya)
- Menjadikan Sungai Sebagai Sumber Kehidupan
- Pengawasan Perairan Terpadu
- RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil)
- Rehabilitasi Mangrove/Vegetasi Pantai dan Terumbu Karang Buatan

B. INVENTARISASI PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

Hasil notulensi dari diskusi sebagaimana terlampir, yang mana berisi tentang permasalahan atau saran/masukan dan akan dibahas lebih lanjut secara internal terkait tindak lanjutnya.

Demikian hasil rumusan Rapat Kerja Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan untuk dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan perencanaan strategis pembangunan kelautan dan perikanan di Jawa Timur untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Surabaya, Juni 2019

LAMPIRAN

HASIL NOTULENSI SARAN/MASUKAN/PERMASALAHAN

• **Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur**

NO	SARAN/PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	Kab Banyuwangi		
1	Menyampaikan sekaligus menagih mungkin ada Pergub atau apa terkait dengan implementasi dan kendala di Kab/Kota terkait UU 23 Tahun 2014. Contoh terkait pengolahan di Kab/Kota tidak ada P2HP, kebetulan di Kab. Banyuwangi ada bidang pangan sehingga bidang pengolahan disisipkan di bidang pangan		
2	Di Banyuwangi ada smart kampung, juga da connecting wifi ² gratis sehingga millennialnya sudah cukup namun ketika bicara perizinan 1 atap yang terkait izin 1 atap kelautan dan perikanan belum ada		
3	Melihat seiring sejalan program Jawa Timur, tidak hanya mengandalkan kuantitas dan kualitas namun daya tarik. Persoalan perlu dukungan dari Jatim terkait dengan zona ² laut terkait RTZ nya. Perlu dikaji tata ruag tiap Kabupaten sehingga potensinya nampak karena setiap daerah tidak sama		
4			
	Kab Tuban		
1	Berbicara tentang nilai tambah atau daya saing. Apakah dalam konteks produksi bisa dijadikan base material dalam mencapai nilai tambah. Ada beberapa perusahaan ² di Kab. Tuban (9 perusahaan ekspor) yang 2 perusahaan untuk mendapatkan bahan baku saja harus mati ² an untuk mencukupi, hanya mendapatk sebuah bahan baku baik itu untuk ikan yang bernilai ekonomis tinggi maupun kualitas lokal. Perlu kebijakan makro untuk areal tangkap, Jatim belum berani mengeluarkan surat terkait penggunaan alat cantrang. Menjadi persoalan para pengusaha olahan sangat serius berdampak pada serapan tenaga kerja.		
2	Berbicara tentang produksi yaitu mengconnectingkan pusat ² produksi yang		

	ada di Kab lain dengan pusat olahan sehingga harga komoditas tidak turun		
3	terdapat persoalan di budidaya khususnya udang sama tiap tahun, tentunya harus ada sebuah SOP baku yang bisa mengatasi persoalan ini		
4	Komoditi garam potensinya sungguh luar biasa, tetapi megoptimalkan kapasitas produksi dengan mengaplikasikan teknologi sehingga menaikkan harga. Mempelopori HPP garam untuk Jawa Timur		
	Kab Sumenep		
1	Ditetapkan sebagai minapolitan rumput laut Tahun 2013 namun sampai saat ini belum tersentuh program2 dari pusat sehingga kondisinya sampai saat ini hidup segan mati tak mau, menginginkan ada surat dari Gubernur sebagai dasar untuk mengalokasikan anggaran terkait UU 23		
	Prof Daniel		
1	Tradnya yang sering kali tidak dikuasai sehingga hasilnya tidak banyak, mungkin teknologi informasi membantu		
	Dr Makhfud		
1	Terkait garam, Bu Wagub menginginkan pembangunan sains technopark seperti di Jepang		
2	Program yang bisa sinergi antar stakeholder (STP, TTP)		

• **Kebijakan Pengawasan SDKP KKP RI**

NO	SARAN/PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	Kab Banyuwangi		
1	Dikarenakan Implementasi UU No 23 Tahun 2014, kab/kota tidak memiliki kewenangan PSDKP sehingga tidak dapat melaksanakan pengawasan maupun menangani tindak pelanggaran dengan cepat		
2	Kewenangan P3KP juga hilang dari Dinas Kab/kota Sehingga Dinas Kab/kota tidak dapat menangani secara cepat permasalahan yang terjadi di lapang contohnya adalah Kasus Isu Cacing pada unit usaha pengolahan di kab Banyuwangi. Dinas Kab Banyuwangi telah bersurat pada Badan POM namun tidak ada tanggapan		
3	Tanda-tanda jika ikan Lemuru habis namun tidak dapat kewenangan dalam mengatasinya		

4	Perlu adanya sinergitas terkait PSDKP. Kab/kota bertugas apa, harus bagaimana, anggaran darimana dan SDM petugas dari mana		
	Kab Tuban		
1	Sejak UU 23 Tahun 2014 berlaku, kab/kota terbatas ruang gerak dan hanya dapat melapor ke provinsi atau pusat. Contoh terjadi pada saat musim penangkapan BL, hal tersebut sudah dilaporkan namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya . Apakah memang aturan tentang penangkapan BL tetap diterapkan ? atukah ada jalan tengah misalkan BL boleh ditangkap namun untuk dibudidayakan di dalam negeri ?		
2			

• Kebijakan Pengelolaan Ruang Laut KKP RI

NO	SARAN/PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	Kab Banyuwangi		
1	Kabupaten ingin mengelola pulau kecil namun RTZ belum ditindaklanjuti. Ibu Menteri KKP sudah berkunjung ke lapang.		

• Kebijakan Perikanan Tangkap KKP RI

NO	SARAN/PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	Kab Banyuwangi		
1	Untuk asuransi perlu ditambah tidak hanya jiwanya namun termasuk sarprasnya		
2	Sebagaimana amanah pesisir itu kotor karena kiriman2 ternyata, sehingga perlu adanya sarpras seperti perahu pembersih pantai dan alat2 pesisir yang membersihkan sampah tersebut dan mengolah sampah menjadi limbah energi		
3	Sarpras tidak hanya alat tangkap tapi alat kebersihan yang ada di wilayah pesisir dan pantai		
	Kab Tuban		
1	Provinsi mewakili dasar isian permasalahan dan melibatkan kabupaten kota dalam mencari solusi. UU No. 7 Tahun 2016 Nelayan kecil harus dilindungi, tetapi saya belum melihat perlindungan yang didapatkan kepada nelayan kecuali bantuan premi nelayan. Perlu dijadikan prioritas melalui		

	perlindungan / kesejahteraan nelayan. Jika di peternakan sapi hilang dapat diganti tetapi di perikanan misalkan jarring hilang kabupaten tidak bisa mengganti alat tsb.		
2	Nelayan tidak pernah dijadikan faktor penentu tenaga kerja, ABK apakah termasuk tenaga kerja yang setengah arian apakah 8 jam		

• **Kebijakan Perencanaan KKP RI**

NO	SARAN/PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	Kab Banyuwangi		
1	Sinergitas pencapaian target PDRB antara pusat, provinsi dan kab/kota		

• **Kebijakan Perencanaan DKP Prov Jatim**

NO	SARAN/PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	Kab Banyuwangi		
1	Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota masih wait and see, top down dan koordinator merangkap pelaksana akibat UU 23 Tahun 2014. Sebagai bahan masukan sebelum dilaksanakan Raker ada baiknya DKP Provinsi Jawa Timur menginventarisir permasalahan dan kebutuhan apa saja yang ada di Kab/Kota sehingga pada saat pelaksanaan Raker		
	Prof Daniel		
2	Memang pelimpahan kewenangan daerah masih menyisakan banyak pe er, saya melihat Kementerian itu mencampur adukan dengan space, jadi UU 23 itu wilayah atau sektor. Jadi masih banyak tumpang tindih dan sampai saat ini belum memiliki pemerintahan yang mengatur kemaritiman yang efektif yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi di sektor Kelautan dan Perikanan. Sebagai contoh sektor UPI diambil oleh kementerian perdagangan bukan oleh kementerian kelautan		
3	Kab/Kota membuat nomenklatur sendiri dan kewajiban sendiri ² , sehingga akan menghadapi permasalahan ² serupa yang		

	perencanaannya bersifat transaksional, selama ini masih berupa keinginan dan berulang2 di dinas tertentu. Sehingga dapat disimpulkan perencanaan itu bersifat transaksional bukan bersifat keinginan.		
	Kab Tuban		
	Waktu RAKER agar dilaksanakan lebih awal agar hasil RAKER dapat diusulkan di Kab Kota melalui DAK.		

• **Kebijakan Perikanan Budidaya DKP Prov Jatim**

NO	SARAN/PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1			
2			
3			

• **Kebijakan Pengolahan dan Pemasaran Produk KP DKP Prov Jatim**

NO	SARAN/PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	Prof Daniel		
1	Memang pelimpahan kewenangan daerah masih menyisakan banyak pe er, saya melihat Kementerian itu mencampur adukan dengan space, jadi UU 23 itu wilayah atau sektor. Jadi masih banyak tumpang tindih dan sampai saat ini belum memiliki pemerintahan yang mengatur kemaritiman yang efektif yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi di sektor Kelautan dan Perikanan. Sebagai contoh sektor UPI diambil oleh kementerian perdagangan bukan oleh kementerian kelautan		
	Kab Banyuwangi		
1	Memang kondisi UU 23 Tahun 2014, kenyataan sekarang untuk di Muncar perusahaan sudah banyak pengurangan tenaga kerja dan DKP Kab. Banyuwangi tidak bisa mengintervensi pengolahan dan surat keterangan asal tidak jelas.		
2	Di Banyuwangi dulunya kelautan dan perikanan sekarang menjadi perikanan dan pangan sehingga kewenangannya bertambah		

Tim Perumus